



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
NOMOR 7 TAHUN 2026  
TENTANG

PENETAPAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tim Pembangunan Zona Integritas berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2026, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah menyusun Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tentang Penetapan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Jaya Barat  
Pada Tanggal 3 Juni 2026  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

ttd.

GUNARTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Sekretaris,

Muhammad Faizal







| NO | KOMPONEN   | INDIKATOR  | LANGKAH AKSI   | BUKTI FISIK   | PELAKSANAAN BULANAN |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | PENANGGUNG JAWAB |  |  |
|----|--|--|--|---|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------------------|--|--|
|    |  |  |  |   | 1                   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |                  |  |  |
|    |  |  |  | Rapat Sosialisasi Rencana Aksi ZI   |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                  |  |  |
|    |  |  |  | f. Dokumen Rencana Aksi dipublikasikan melalui website KPU Kabupaten Lampung Tengah |                     |   |   |   | √ |   |   |   |   |    |    |    |                  |  |  |
| 3  | Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM | <i>Timeline</i> pemantauan dan evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM (per-triwulan/per-semester) | Rapat evaluasi pembangunan ZI per semester atau per triwulan | a. Undangan, Daftar hadir dan Dokumentasi Rapat Evaluasi Pembangunan ZI             |                     |   |   |   |   | √ | √ |   |   |    |    |    |                  |  |  |
|    |  |  |  | b. Risalah Rapat Evaluasi Pembangunan ZI  |                     |   |   |   |   | √ | √ |   |   |    |    |    |                  |  |  |
|    |  |  |  | c. Undangan, Daftar Hadir dan Dokumentasi Rapat Pleno                               |                     |   |   |   |   |   | √ | √ |   |    |    |    |                  |  |  |
|    |  |  |  | d. Dokumen LKE (Lembar Kerja Evaluasi) Pembangunan ZI                               |                     |   |   |   |   |   | √ | √ |   |    |    |    |                  |  |  |
|    |  |  |  | e. Dokumen Tindak Lanjut Evaluasi Pembangunan ZI                                    |                     |   |   |   |   |   | √ | √ |   |    |    |    |                  |  |  |
|    |  |  |  | f. Dokumentasi Pelaksanaan dan  |                     |   |   |   |   |   |   | √ | √ |    |    |    |                  |  |  |



| NO                              | KOMPONEN  | INDIKATOR   | LANGKAH AKSI  | BUKTI FISIK   | PELAKSANAAN BULANAN |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | PENANGGUNG JAWAB |
|---------------------------------|---|---|---|---|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------------------|
|                                 |   |   |   |   | 1                   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |                  |
|                                 |   |   |   | ZI yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Lampung Tengah  |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                  |
| <b>II Penataan Tata Laksana</b> |   |   |   |   |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                  |
| 1                               | Prosedur Operasional Standar (SOP) kegiatan utama | SOP telah mengacu pada proses bisnis instansi dan dipahami seluruh pegawai SOP telah dievaluasi | 1) Seluruh pegawai telah mengetahui SOP yang telah ditetapkan;<br>2) SOP tersedia di ruang pelayanan;<br>3) Melaksanakan evaluasi dokumen SOP | a. Undangan. Daftar hadir dan Dokumentasi Rapat Sosialisasi SOP Alur Kerja KPU Kabupaten Lampung Tengah<br>b. Screenshot / foto ketersediaan SOP<br>c. Dokumen SOP<br>d. Undangan, Daftar Hadir dan Dokumentasi Rapat Evaluasi SOP<br>e. Risalah Rapat Evaluasi SOP |                     |   |   |   |   | √ | √ |   |   |    |    |    |                  |
| 2                               | E-Office Pemanfaatan Aplikasi Presensi            | Operasional Manajemen SDM sudah menggunakan   | Aplikasi laporan kinerja harian ASN Memanfaatkan Teknologi Informasi  | Aplikasi laporan kinerja harian ASN KPU Kabupaten Lampung Tengah  |                     |   |   |   |   | √ |   |   |   |    |    |    |                  |

Tim Penataan Tata Laksana



| NO         | KOMPONEN                             | INDIKATOR   | LANGKAH AKSI   | BUKTI FISIK   | PELAKSANAAN BULANAN |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | PENANGGUNG JAWAB |  |
|------------|--------------------------------------|---|--|---|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------------------|--|
|            |                                      |   |  |   | 1                   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |                  |  |
|            |                                      | Pemanfaatan IT telah dilakukan secara berkala                               |  |   |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                  |  |
| 3          | Keterbukaan Informasi Publik         | Kebijakan Informasi Publik telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan | 1) KPU Kabupaten Lampung Tengah menerapkan keterbukaan informasi publik<br>2) KPU Kabupaten Lampung Tengah menyediakan informasi publik secara jelas, akurat dan tepat waktu | Dokumen-dokumen kepemiluan yang dapat diakses oleh publik melalui PPID maupun secara online melalui e-PPID, Piagam-piagam penghargaan |                     |   |   |   |   | √ |   |   |   |    |    |    |                  |  |
|            |                                      | Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik  | Melaksanakan rapat monitoring/evaluasi terkait keterbukaan informasi pada KPU Kabupaten Lampung Tengah   | a. Undangan, Daftar hadir dan Dokumentasi Rapat Evaluasi PPID   |                     |   |   |   |   | √ |   |   |   |    |    |    |                  |  |
|            |                                      |   |  | b. Risalah Rapat Evaluasi Pelaksanaan PPID  |                     |   |   |   |   | √ |   |   |   |    |    |    |                  |  |
|            |                                      |   |  | c. Laporan pengelolaan dan pelayanan informasi publik tahun 2024  |                     |   |   |   |   | √ |   |   |   |    |    |    |                  |  |
| <b>III</b> | <b>PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM</b> |   |  |   |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                  |  |

| NO | KOMPONEN  | INDIKATOR   | LANGKAH AKSI   | BUKTI FISIK  | PELAKSANAAN BULANAN |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | PENANGGUNG JAWAB                             |
|----|---|---|--|--|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--|
|    |   |   |  |  | 1                   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1  | Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan kebutuhan | Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan                                      | Menyusun analisa kebutuhan pegawai   | Surat usulan kebutuhan pegawai (SE Sekjen Nomor 939 tanggal 12 April 2021) |                     |   |   |   |   | √ |   |   |   |    |    |    | Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara |
|    |   | Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan        | Penempatan Formasi CPNS, atau ada dokumen terkait proses rotasi, atau upaya pengajuan pegawai baru/dokumen usulan ke Sekjen KPU RI | SK Penempatan, Pengumuman CPNS   |                     |   |   |   |   | √ |   |   |   |    |    |    |  |
|    |   | Monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi | Evaluasi kinerja CPNS dan PNS  | Dokumen SKP CPNS dan Laporan Tahunan Kinerja PNS                           |                     |   |   |   |   | √ |   |   |   |    |    |    |  |
| 2  | Pola Mutasi Internal                                  | Menetapkan kebijakan pola   | Melaksanakan rotasi internal   | SPMT Rotasi Internal dan SK/ST   |                     |   |   |   |   | √ |   |   |   |    |    |    |  |











| NO       | KOMPONEN                    | INDIKATOR   | LANGKAH AKSI   | BUKTI FISIK   | PELAKSANAAN BULANAN |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | PENANGGUNG JAWAB |                |
|----------|-----------------------------|---|--|---|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------------------|----------------|
|          |                             |   |  |   | 1                   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |                  |                |
|          |                             |   |  | Tahun 2025 tepat waktu  |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                  |                |
|          |                             | Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja                  | Menyusun LAKIP 2025  | LAKIP (LKj) KPU Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025 tepat waktu | √                   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                  |                |
|          |                             | Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja | Menyusun LAKIP 2025  | Draft dan Dokumentasi rapat penyusunan LAKIP (LKj) 2025         | √                   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                  |                |
|          |                             | Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten         | Menyusun Surat Permohonan Narasumber terkait Penyusunan LAKIP                              | Surat Permohonan Narasumber terkait Penyusunan LAKIP (LKj)      | √                   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                  |                |
| <b>V</b> | <b>PENGUATAN PENGAWASAN</b> |   |  |   |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                  |                |
| 1        | Pengendalian Gratifikasi    | <i>Public Campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi telah dilakukan       | Memasang poster tentang gratifikasi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Lampung Tengah | Foto spanduk, baloho, roll banner, dan lemari gratifikasi       |                     |   |   |   |   | √ |   |   |   |    |    |    |                  | Tim Pengawasan |
|          | Pengendalian Gratifikasi    |   | Membuat Tim Unit Pengendalian  | a. SK Unit Pengendalian   |                     |   |   |   |   | √ |   |   |   |    |    |    |                  |                |



| NO | KOMPONEN             | INDIKATOR  | LANGKAH AKSI   | BUKTI FISIK   | PELAKSANAAN BULANAN |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|----------------------|--|--|---|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------------------|--|
|    |                      |  |  |   | 1                   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |                  |  |
|    |                      | SPIP telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak | Rapat Monitoring dan Rencana Pengendalian Evaluasi Tindak  | a. Undangan, Daftar hadir Rapat Koordinasi Pelaksanaan SPIP |                     |   |   |   | √ |   |   |   |   |    |    |    |                  |  |
|    |                      |  |  | b. Risalah Rapat Koordinasi Pelaksanaan SPIP                |                     |   |   |   | √ |   |   |   |   |    |    |    |                  |  |
|    |                      |  |  | c. Dokumentasi Rapat Koordinasi Pelaksanaan SPIP            |                     |   |   |   | √ |   |   |   |   |    |    |    |                  |  |
| 3  | Pengaduan Masyarakat | Kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan             | Melakukan Sosialisasi Implementasi Pengaduan Masyarakat yang dilakukan oleh pegawai KPU Kabupaten Lampung Tengah | Foto Brosur Saluran Penyampaian Pengaduan Masyarakat        |                     |   |   |   | √ |   |   |   |   |    |    |    |                  |  |
|    |                      | Hasil penanganan Pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti        | Memberikan tanggapan/tindakan lanjut atas Daftar Pengaduan yang disampaikan oleh Inspektorat                     | Bukti tanggapan   |                     |   |   |   |   | √ |   |   |   |    |    |    |                  |  |
|    |                      | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas                       | Menyusun monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan   | Laporan evaluasi dalam bentuk rekapitulasi                  |                     |   |   |   |   | √ |   |   |   |    |    |    |                  |  |

| NO | KOMPONEN                      | INDIKATOR   | LANGKAH AKSI   | BUKTI FISIK  | PELAKSANAAN BULANAN |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------------------|---|--|--|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------------------|
|    |                               |   |  |  | 1                   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |                  |
|    |                               | penanganan pengaduan masyarakat   | masyarakat   |  |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                  |
|    |                               | Telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat | Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi penanganan pengaduan masyarakat   | Tabel tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat        |                     |   |   |   |   | √ |   |   |   |    |    |    |                  |
| 4  | <i>Whistle Blowing System</i> | <i>Whistle Blowing System</i> sudah diinternalisasikan dan diterapkan     | Menyosialisasikan pedoman pelaksanaan <i>Whistle Blowing System</i> , serta sosialisasi tata cara penyampaian WBS di KPU Kabupaten Lampung Tengah dengan cara berkoordinasi dengan Inspektorat | Banner Saluran Penyampaian WBS                             |                     |   |   |   |   | √ |   |   |   |    |    |    |                  |
|    |                               | <i>Whistle Blowing System</i> telah diterapkan                            | Implementasi <i>Whistle Blowing System</i>   | Laporan hasil rapat WBS internal dan KPU Kabupaten/Kota    |                     |   |   |   |   | √ |   |   |   |    |    |    |                  |
|    |                               | Evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i> sudah               | KPU Kabupaten Lampung Tengah berkoordinasi dengan Inspektur KPU  | Laporan Evaluasi dalam bentuk rekapitulasi setiap triwulan |                     |   |   |   |   | √ |   | √ |   |    |    |    | √                |





| NO | KOMPONEN               | INDIKATOR   | LANGKAH AKSI  | BUKTI FISIK                          | PELAKSANAAN BULANAN |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | PENANGGUNG JAWAB |
|----|------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------------------|
|    |                        |   |   |                                      | 1                   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |                  |
|    |                        | pelayanan   |   |                                      |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                  |
|    |                        | Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan SOP                                  | Melaksanakan kaji ulang dokumen   | Perbaikan SOP                        | √                   | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √  | √  | √  | √                |
| 2  | Budaya pelayanan prima | Telah dilakukan sosialisasi/ pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima       | Melaksanakan sosialisasi penerapan budaya kerja melalui arahan Ketua pada rapat | Daftar hadir notulen dokumen terkait |                     |   |   | √ |   |   |   |   |   |    |    |    |                  |
|    |                        | Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media                          | Informasi tentang standar pelayanan yang tertera di website dan media sosial    | Haamn Website KPU dan Media Sosial   |                     | √ |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                  |
|    |                        | Telah terdapat sistem punishment (sanksi) / reward bagi pelaksana layanan serta pemberian | Menetapkan Pegawai yang berprestasi untuk mendapatkan penghargaan               | SK Pegawai Berprestasi 2025 dan 2026 |                     |   |   |   |   |   |   |   | √ |    |    |    |                  |



| NO | KOMPONEN | INDIKATOR   | LANGKAH AKSI                                     | BUKTI FISIK  | PELAKSANAAN BULANAN |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|----------|---|--|--|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------------------|--|
|    |          |   |  |  | 1                   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |                  |  |
|    |          | masyarakat dapat diakses secara terbuka                       | pelayanan KPU melalui website KPU                |  |                     |   |   |   |   | √ |   |   |   |    |    |    |                  |  |
|    |          | Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat | Menindaklanjuti hasil survei kepuasan masyarakat | Analisis survei kepuasan masyarakat dan tindak lanjutnya |                     |   |   |   |   | √ |   |   |   |    |    |    |                  |  |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

ttd.

GUNARTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Sekretaris,

Muhammad Faizal

